

BAB II

KEBIJAKAN LUAR NEGERI TURKI TERHADAP ISRAEL

Kebijakan luar negeri suatu negara tidak terlahir melalui proses yang singkat. Turki dan Israel telah melalui banyak dinamika dan tantangan serta periode masing-masing pemimpin, yang memiliki corak tersendiri dalam kebijakan luar negerinya. Untuk dapat memahami bagaimana Ambivalensi dapat tercermin dalam kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel, aspek sejarah menjadi penting dan memberikan pencerahan tentang garis besar kebijakan luar negeri Turki. Bab ini akan mendeskripsikan kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel sejarak diakronis.

Bagian pertama bab ini akan menggambarkan secara umum runut periode kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel. Bagian ini dipecah dalam beberapa sub-subbab berdasarkan kepemimpinan rezim yang memiliki implikasi terhadap hubungan bilateral dengan Israel. Bagian kedua dari bab ini adalah gambaran umum mengenai politik domestik dari Turki. Bab ini ditutup dengan kesimpulan umum dari *setting* permasalahan dalam penelitian ini.

2. 1 Hubungan Diplomatik Turki - Israel Sebelum Masa Kepemimpinan Presiden Erdoğan

2. 1. 1. Rezim Presiden Celâl Bayar (1950 – 1960)

Dalam perjalanan diplomatiknya, Israel tidak hadir sebagai pendatang baru dalam hubungan diplomatik dengan Turki. Turki dan Israel telah menjalin hubungan bilateral diplomatik yang berlangsung sejak awal berdirinya Israel. Turki

mengakui keberadaan Israel setahun setelah Israel berdiri, pada Maret 1949 secara *de facto* dan pada Januari 1952 mengakui kedaulatan secara *de jure* (Hassan, 2008, pp. 921–922). Pengakuan diplomatik ini terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Celâl Bayar, Presiden ketiga dari Turki. Hubungan bilateral ini terlahir dengan baik, tidak terlepas dari situasi geopolitik regional pada masa itu yang didasarkan atas perebutan kekuasaan antara kubu liberal seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dengan sosialis seperti Uni Soviet. Pada masa awal kerjasama bilateral antara Turki dengan Israel, perhatian kepentingan nasional dipusatkan untuk mencegah meluasnya pengaruh dan hegemoni sosio-komunisme dari Uni Soviet.



Gambar 2. 1. Peta lokasi negara Turki dan Israel. *Sumber: The Israeli Institute for Regional Foreign Policy, 2023. Telah diolah kembali*

Sebagai salah satu negara yang berperan dalam *containment* dari ekspansi komunisme Uni Soviet, Turki pada saat itu memiliki peranan yang vital. Kepahitan hubungan historis antara Turki dengan Uni Soviet pasca Perang Dunia 1 yang diisi oleh beberapa sengketa wilayah, mendorong kebijakan luar negeri Turki untuk

melakukan pendekatan intensif kepada negara-negara Barat. Dapat dilihat pada masa pra-Perang Dunia 2 saat Uni Soviet menegosiasikan persengketaan wilayah Kars dan Ardahan di timur Turki dan pembangunan pangkalan militer Uni Soviet di selat Dardanella (di ujung Laut Hitam) (M. S. Bilgin, 2017, p. 4). Kecondongan Israel kepada Turki sebagai negara yang pada saat itu baru saja berdiri, bukan tanpa alasan yang jelas. Dapat disebutkan bahwa Israel pada saat itu memang menjadi representasi dari pihak liberal. Fokus utama yang dimiliki kedua negara sebagai kepentingan yang mendesak adalah alasan keamanan. Terbukti melalui sikap yang diambil oleh Turki yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Fuat Koprulu (yang berasal dari *Demokrat Parti* atau Partai Demokrat) pada tahun 1951 yang menyatakan bahwa kepentingan nasionalnya (terutama dari sisi keamanan) sejalan dengan negara-negara Barat yang tergabung dalam NATO. Kepentingan kolektif ini yang lantas mendekatkan Turki kepada Israel secara diplomatik.

Pandangan Kemalis memiliki pengaruh yang kuat dalam masa ini. Pandangan ini didasarkan atas pemahaman demokrasi dan keleluasaan yang didasarkan pada sekularisme. Cabang pandangan elit politik yang bersifat Kemalis mengacu kepada pengambilan keputusan (*decision-making*) yang terlepas dari dominasi unsur sosial di dalamnya yang mengacu pada kolektivitas agama (Merryman, 2013, p. 36). Periode ini menunjukkan pragmatisme Turki yang tidak menjadikan sejarah atas kolektivitas agama dan budaya sebagai penentu arah kebijakannya. Kecondongan Turki terhadap Israel dan negara-negara Barat (terutama Israel, Amerika Serikat dan Eropa Barat) menunjukkan perhatiannya terhadap kepentingan keamanan yang

tentu tidak mempedulikan kesan yang ditampilkan negara-negara tetangganya dalam geopolitik regional.

Fokus dari kepentingan Turki mulai dilebarkan kepada geopolitik regional dengan mengambil peran dalam pembentukan Pakta Baghdad bersama Irak dan Inggris. Di sini, pandangan elit politik Turki menyadari ambisi pembangunan tidak bisa dilakukan secara strategis jika tidak menjalin hubungan multilateral dengan baik bersama negara-negara Timur Tengah. Tujuan strategis ini mendorong elit-elit politik Turki untuk melihat Israel sebagai jembatan dan sahabat untuk kepentingan-kepentingannya yang belum tentu bisa dipenuhi dengan kerjasama bersama negara-negara Arab. Meskipun persepsi negara-negara tetangga terhadap perilaku Turki pada periode Perang Dingin dan Pakta Baghdad tidak sepenuhnya baik. Terutama dari Mesir, yang menganggap bahwa langkah Turki yang terlibat dalam Pakta Baghdad sebagai tindakan yang berisikan kebohongan saat kedekatannya dengan Israel dan negara-negara Barat masih melekat kuat. Dan juga dari Irak yang pada tahun 1957, memihak kepada Kepulauan Siprus dalam sengketa dengan Turki pada konflik Siprus di meja perundingan PBB (Brandenburg, 2005, p. 4). Namun demikian, adanya pandangan historis yang tidak baik antara Turki dengan negara-negara Arab mendorong aliansi Turki dan Israel berjalan lebih jauh. David Ben-Gurion dan Adnan Menderes membentuk aliansi periferal antara Israel dan Turki yang bersifat klandestin secara bilateral. Ada banyak hal yang dicakup dalam pembentukan aliansi periferal ini. Politik, ekonomi, militer dan hal-hal lainnya ikut dijadikan topik kerjasama antara Ankara dan Tel Aviv.

2. 1. 2. Rezim Presiden Cemal Gursel (1961 – 1973)

Perkembangan berikutnya dalam hubungan diplomatik antara Turki dengan Israel mengalami kemerosotan. Sebab pada tahun 1960, Perdana Menteri Adnan Menderes dari Partai Demokrat digulingkan oleh militer Turki yang mengambil alih pemerintahan. Di bawah kepemimpinan Jenderal Cemal Gursel, Turki tetap menjalankan hubungan bilateralnya dengan Israel. Turki melaksanakan hubungan bilateral di masa ini dengan sedikit keengganan, karena alasan strategis untuk kembali menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara yang dahulu dianggap ancaman (*rapprochement*) (Bengio, 2004, pp. 56–57). Dalam skala diplomatik, Turki masih melanjutkan kerjasamanya dengan Israel, namun tanpa peningkatan yang berarti. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Ismet Inonu, satu-satunya perkembangan yang dibuat oleh Turki dalam hubungan bilateralnya dengan Israel adalah di bidang ekonomi dan agrikultur. Pada tahun 1965, nilai perdagangan antara Turki dan Israel menyentuh jumlah USD 30.000.000 dengan perkembangan yang cukup signifikan.⁵ Sementara bidang-bidang yang lain mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran, meskipun perilaku Israel menunjukkan keinginan untuk mendalami lebih jauh kerjasama dengan Turki. Nilai strategis yang memperhatikan kondisi geopolitik melandasi sifat kerjasama bilateral ini.

Mulai tahun 1963, Perdana Menteri Ismet Inonu mengubah trayektori kebijakan luar negeri Turki. Turki mengalami kelandaian kehangatan hubungan diplomatik dengan Israel lebih jauh sampai periode tahun 1969 yang disebabkan oleh konflik yang terjadi di Siprus. Konflik tersebut memiliki perhatian akan arah

⁵ Jumlah ini mengacu pada kurs di tahun yang sama dan belum dikonversikan berdasarkan nilai inflasi.

pemerintahan Siprus yang bersikap netral, atau bersatu (setidaknya dalam pandangan yang seragam) dengan Yunani. Konflik ini dihadiri oleh Turki karena kepentingannya atas orang-orang Turki Siprus yang ada di pulau tersebut. Di bawah pemimpin Siprus, Uskup Makarios III, Siprus akhirnya memilih mendekati diri dengan Yunani. Konflik senjata yang membahayakan masyarakat sipil di sana hampir meletus. Konflik ini diselesaikan dengan Resolusi PBB Nomor 168 yang mengirimkan pasukan perdamaian kepada pemerintahan Siprus yang begitu pro-Yunani. Hal ini membuat Turki berang. Fenomena ini dianggap sebagai kekalahan diplomatik oleh Pemerintah Turki. Israel memperparah situasi ini melalui media massa-nya yang mengakui keberadaan pemerintahan Siprus yang pro terhadap Yunani dan dianggap sebagai tindakan yang mengkhianati kepercayaan Turki (Bengio, 2004, pp. 59–60). Israel dan Turki menyadari tindakan mereka masing-masing dilandaskan oleh pertimbangan strategis akan geopolitik regional yang dihadapi. Meskipun setelah reaksi negatif dari publik dan elit politik Turki, Israel belum melakukan langkah harmonisasi lebih dekat dengan Turki.

2. 1. 3. Rezim Presiden Fahri Korutürk (1974 – 1980)

Masa ini dianggap sebagai perpanjangan periode kepemimpinan militer jika dilihat dari latar belakang Presiden Korutürk yang merupakan birokrat dari Angkatan Laut Turki. Masa ini juga ditandai dengan rezim dua Perdana Menteri dari Partai Keadilan dan Partai Republikan, yaitu Perdana Menteri Bulent Ecevit dan Suleyman Demirel. Secara bertahap, Turki tetap melakukan harmonisasi hubungan dengan negara-negara Arab dengan lebih intensif. Turki melihat isu pergerakan Islam sebagai hal yang mampu merekatkan hubungan diplomatiknya

dengan negara-negara tetangga yang secara kolektif memiliki pandangan politik yang disatukan dengan agama dan budaya. Hal ini digambarkan dengan adanya keberpihakan Turki kepada negara-negara Arab dalam Perang Arab - Israel tahun 1973 dan pengakuan terhadap *Palestinian Liberation Organization* (PLO).

Perubahan sifat kebijakan luar negeri yang begitu tentatif dari Turki berdampak kepada Israel. Kedua negara ini memperhatikan situasi geopolitik dengan cermat, dan berusaha untuk tidak mengambil langkah yang salah dalam kebijakannya. Israel menunjukkan sikap keengganan dalam perubahan-perubahan kebijakan luar negeri yang ditunjukkan oleh Turki. Israel mempertimbangkan faktor keamanan dan kepentingannya di tengah geopolitik regional yang tidak begitu menguntungkan. Dibalik itu, Israel harus menerima kenyataan bahwa pada periode selanjutnya, tidak banyak hasil kerjasama yang membuahkan hasil yang menyenangkan tatkala Turki mengalihkan perhatiannya pada struktur geopolitik regional di Timur Tengah dan bahkan dalam beberapa kesempatan, menunjukkan sifat antagonistik dan reaktif terhadap Israel. Namun, hal ini tetap menunjukkan bahwa Turki masih memosisikan dirinya sebagai negara Barat atau bagian dari negara Barat. Sebab, Turki masih melanjutkan beberapa kerjasama dalam taraf yang lebih rendah meskipun tidak ada kemajuan yang berarti pada tingkat yang tinggi. Kerjasama dengan Israel dianggap memiliki manfaat yang lebih kuat dibandingkan dengan ancaman keterpurukan hubungan dengan negara-negara Arab. Namun hubungan diplomatik ini tetap berjalan dalam sektor ekonomi dan militer. Hubungan diplomatik ini memang memiliki kerahasiaan dan blok, bahkan bagi aktor-aktor politik domestik yang terlibat dalam pembuatan dan pengambilan

kebijakan yang biasanya dikoordinir oleh Kementerian Luar Negeri (Ataman, 2002, p. 123; Bengio, 2004, pp. 66–67).

2. 1. 4 Rezim Presiden Turgut Ozal dan Suleyman Demirel (1990 – 2002)

Pada akhir Perang Dingin, Turki mengambil keuntungan dari pendekatannya kepada negara-negara non-Barat, yang mana kerjasamanya memiliki peningkatan yang signifikan. Pada masa ini, kepemimpinan Turki dijalankan secara dua periode dengan dua presiden yang berbeda, yaitu Turgut Ozal dan Suleyman Demirel. Secara umum, polanya memiliki bentuk yang sama. Namun arah kebijakan memiliki perubahan yang lebih jauh. Landasan kebijakan luar negeri yang sekuler mulai digantikan dengan pemikiran politik yang menjauh dari kecondongan Turki terhadap Barat. Pandangan sekuler pada akhir periode Perang Dingin mulai tergantikan oleh pandangan domestik dominan yang berlandaskan kejayaan dan peran strategis Kesultanan Turki Utsmani. Sejatinya, perubahan ini tidak bersifat radikal. Turki masih memiliki pandangan sekulernya, hanya saja tidak mendominasi dalam kebijakan luar negeri. Ada beberapa hal yang melandasi munculnya pandangan politik yang berdasarkan aspek historis ini. Pertama, naiknya Presiden Turgut Ozal dari Partai Ibu Pertiwi (*Anavatan Partisi*). Presiden Ozal dianggap sebagai orang yang merekonstruksi pembagian kekuasaan antar lembaga yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Presiden Ozal membagikan kekuasaan dalam pengambilan kebijakan luar negeri dengan lebih seimbang. Tidak menitikberatkan pada kementerian luar negeri saja. Di sisi lain, Presiden Ozal memiliki latar belakang histori mengenai konsep ideal negara yang disandingkan dengan kejayaan Turki Utsmani di masa lampau, dalam pandangan politiknya.

Presiden Ozal adalah politisi yang memegang pandangan *Neo-Ottoman*. Terdapat perhatian khusus dari Presiden Ozal terhadap posisi historis Turki dan kaitannya terhadap pandangan politik Islam. Pandangan ini tercermin dalam keputusan dan trayektori kebanyakan politisi dari *Anavatan Partisi*, termasuk Presiden Ozal yang memiliki corak berbeda dengan pandangan Kemalis dari elit politik dan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Pandangan *Neo-Ottoman* pada masa ini membagikan fokus orientasi politik domestik yang kemudian tercermin dalam kebijakan luar negeri Turki dan lebih simpatik terhadap pemikiran politik Islam (Ataman, 2002, p. 127; Murinson, 2006, pp. 946-947).

Pembagian yang kontras tersebut adalah trayektori politik yang kini lebih luas dan terdapat diversifikasi fokus terhadap kerjasama luar negeri yang diambil oleh Turki. Pemikiran *Neo-Ottoman* tidak memosisikan Turki sebagai negara yang harus selalu menyelaraskan kepentingannya dengan negara-negara Barat. Turki memosisikan dirinya sebagai sebuah kekuatan regional yang mampu memenuhi kebutuhannya secara strategis dan memiliki keseimbangan aliansi dengan memperhitungkan keseimbangan geopolitik regionalnya, tanpa harus memihak pada kubu tertentu.

Kedua, pemikiran strategis ini memiliki perhatian terhadap solidaritas politik Islam. Turki mengubah haluan dengan mencoba menjadi poros strategis bagi negara-negara Arab yang mayoritas merupakan negara-negara dengan populasi muslim dominan yang cenderung tidak memiliki tingkat sekularitas yang sepadan dengan Turki. Perubahan ini adalah langkah mundur yang cukup pahit dalam hubungan diplomatik antara Turki dan Israel. Sebab, perhatian terhadap ancaman

keamanan yang menjadi landasan aliansi periferal yang dahulu sudah dibentuk antara kedua negara ini dapat kehilangan urgensinya. Perlu diingat bahwa masing-masing pihak dalam kerjasama periferal ini memiliki kekhawatiran tentang keamanan dan *status quo*. Perubahan pandangan politik ini berdampak pada nadirnya hasil kerjasama bilateral dengan Israel, meskipun tidak ada inisiasi untuk memutus hubungan diplomatik secara utuh. Secara pragmatis, kebijakan luar negeri yang mulai berpihak kepada negara-negara Arab tidak hanya disebabkan perubahan pemikiran politik dari pandangan Kemalis menuju *Neo-Ottoman* saja.

Kebijakan yang pro-Arab ini ditujukan untuk menyeimbangkan situasi geopolitik dan menunjukkan fokus diversifikasi pada aspek kerjasama. Ambivalensi yang kontras mulai terlihat. Pada masa kepemimpinan Partai Demokrat dan Perdana Menteri Perempuan pertama Turki, yaitu Tansu Ciller, dukungan yang formal diberikan kepada Pemerintahan *de facto* Palestina pada tahun 1994 pada saat setelah Perdana Menteri melaksanakan kunjungan resmi ke Israel (Altunisik, 2000, p. 177). Hal ini ditanggapi dengan ketidakpuasan dari sebagian sisi Israel yang melihat bahwa Turki tidak menghargai apa yang selama ini sudah diperjuangkan bersama-sama dengan Israel.

Pandangan publik tentang situasi politik menjadi determinan dalam perubahan haluan. Kebijakan akan menjadi kontras jika faktor tersebut didukung oleh persepsi elit politik yang selaras. Secara diakronik, sejarah hubungan Turki dan Israel memiliki kesamaan pola hingga kini dimulai dari masa kepemimpinan Presiden Turgut Ozal. Persepsi dan pola pengambilan kebijakan dari doktrin sekularisme pandangan Kemalis yang tergantikan oleh pandangan Islam

konservatif memberikan suasana baru dalam kebijakan luar negeri Turki. Adapun hingga masa sebelum naiknya Erdoğan sebagai Perdana Menteri Turki dan berikutnya sebagai Presiden Turki, pola pengambilan kebijakan terhadap Israel yang bersifat kontras dan antagonistik ada pada Perdana Menteri Necmettin Erbakan dengan Presiden Suleyman Demirel.

Perdana Menteri Erbakan tidak memiliki sifat yang moderat kepada Israel.. Erbakan dengan *Millî Selâmet Partisi* dan kemudian *Refah Partisi* memiliki paham anti-zion sebagai sintesis dari pandangan Islam konservatif yang mereka anut (Bishku, 2006, pp. 178–179). Hasil dari aspek politik domestik inilah yang nantinya, pada masa Necmettin Erbakan memimpin sebagai Perdana Menteri Turki pada tahun 1996 sampai 1997, mencerminkan hubungan Turki terhadap Israel.

Pada masa tersebut, Perdana Menteri Erbakan merekonsiliasi hubungan dengan negara-negara Arab dengan lebih intensif. Pendekatannya terkadang tidak disukai oleh beberapa kalangan, terutama militer. Pertentangan domestik inilah yang menyelamatkan Israel dari deterioriasi hubungan diplomatik lebih jauh dengan Turki. Perdana Menteri Erbakan tidak memiliki niat dan tujuan untuk meningkatkan hubungan antara Israel dan Turki yang mendingin. Militer mampu menekan Perdana Menteri Erbakan dalam isu Israel. Resistensi akan pandangan Islam konservatif memberikan keseimbangan hingga pada akhirnya hubungan bilateral dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya (Brandenburg, 2005, p. 7; Hamid, 2004, p. 117).

Pada tahap yang berikutnya, landasan *Neo-Ottoman* mengisi pengaruh bagi elit politik Turki hingga kini. Suksesor Partai Refah, yaitu Partai AKP yang

didirikan oleh Recep Tayyip Erdoğan, masih memiliki motif Islam konservatif yang kuat hingga kini. Hal ini didukung oleh pandangan progresif tentang politik, kepentingan serta pengaruh agama dalam persaingan untuk kekuatan (*struggle for power*). Hal ini memberikan pengaruh pada kerjasama bilateral yang terjalin antara Turki dengan Israel yang kini memiliki Ambivalensi yang kuat. Turki tidak mengambil perhatian khusus kepada banyak dimensi kerjasama bilateral lainnya dengan Israel kecuali dalam bidang keamanan dan ekonomi yang tidak mampu dikorbankan. Sebab dalam kalkulasi untung-rugi, Turki masih melihat Israel sebagai rekan bilateral yang penting. Sejarah hubungan bilateral antara kedua negara ini menunjukkan bahwa interdependensi telah terjalin sejak lama, berdasarkan alasan yang logis, dan bersifat strategis bahkan hingga masa ini.

2. 2. Hubungan Turki – Israel pada Masa Erdoğan

Dalam sub-bab ini, penelitian ini mengurai mengenai hubungan Turki terhadap Israel pada masa Erdoğan. Erdoğan adalah pemain kunci dalam kebijakan luar negeri Turki saat Partai AKP memegang kendali kekuasaan. Gambaran umum sub-bab ini memiliki dua periode, yaitu tahun 2010 sampai 2014 saat Erdoğan masih menjabat sebagai Perdana Menteri dan 2014 sampai 2018 saat Erdoğan terpilih menjadi Presiden Turki. Sub-bab ini menggambarkan secara umum titik panas dari hubungan Turki terhadap Israel pada masa Erdoğan.

2. 2. 1. Pandangan Erdoğan Terhadap Negara Turki

Erdoğan dan partainya telah menjadi aktor politik utama di Turki semenjak tahun 2002 hingga sekarang. Erdoğan membawa banyak perubahan dalam sektor pemerintahan di Turki. Pandangan serta jalur politik dari Erdoğan dan Partai AKP menjadi pembahasan menarik tatkala dikaitkan dengan kepentingan nasional yang hendak diraih oleh Erdoğan. Sub-subbab ini memberikan penjelasan singkat mengenai bagaimana Erdoğan melihat potensi dan tantangan yang dimiliki oleh Turki.

Erdoğan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada sektor pemerintahan sipil untuk berperan lebih banyak dan mulai membagi porsi kekuatan untuk semua komponen sosial Masyarakat dalam lembaga-lembaga politik dalam negeri (Baykal, 2009, pp. 7–10). Erdoğan menggunakan politik solidaritas dengan menghilangkan sekat-sekat pembeda untuk menjadikan Turki sebagai satu identitas yang besar (Akdoğan, 2018, pp. 9–10). Perubahan ini membawa Erdoğan dan Partai AKP kepada dukungan publik yang lebih luas.

Erdoğan memiliki kharisma yang baik. Sebagai penerus dari Necmettin Erbakan, Erdoğan memiliki pandangan politik yang dilandaskan atas persatuan kekuatan Islam. Ini adalah fakta yang mampu membentuk pandangan bahwa Turki adalah “Bumi Perisai Terakhir Kaum Muslim”. Partai AKP melihat Turki sebagai pemimpin alami dari Politik Islam di kawasan Timur Tengah, dan beragam kebijakan politik luar negerinya (termasuk terhadap Israel) lebih berpihak kepada kalangan umat Islam (Hoffman et al., 2018, pp. 28–32). Bukti dari komitmen Erdoğan terhadap solidaritas politik Islam dapat terlihat dari respon Turki terhadap Israel tatkala terjadi eskalasi konflik antara Israel dan Palestina (Karmon & Barak,

2018, pp. 75–77). Erdoğan membangun citra untuk mempermudah pemenuhan kepentingan nasional Turki dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab yang mayoritas populasinya adalah muslim.

Erdoğan memiliki keyakinan bahwa Turki dapat kembali berjaya dan menjadi aktor geopolitik regional yang dominan seperti masa Kesultanan Utsmaniyah terdahulu (Hazir, 2022, pp. 173–174). Erdoğan melihat keberadaan negara-negara Barat sebagai sumber permasalahan yang ada di kawasan Timur Tengah dan senantiasa memosisikan Turki berdasarkan pandangan politiknya yang beraliran Islam Konservatif. Erdoğan memahami betul makna “*The Sick Man of Europe*” sebagai bentuk keresahannya maupun masyarakat Turki terhadap kekuatan nasional dan kedigdayaan negaranya (Hoffman et al., 2018, p. 12). Erdoğan mengubah keresahan dan kekhawatiran tersebut menjadi sebuah perjalanan dan tujuan dari Turki untuk kembali menjadi kekuatan regional di kawasan Timur Tengah.

Penulis mengkaji pandangan Erdoğan dengan mengindahkan batas-batas teoretis yang penulis gunakan. Sikap dan pandangan Erdoğan yang telah dijabarkan merupakan hasil dari interaksi politik dari Erdoğan itu sendiri. Sikap tersebut tercermin dalam beragam kebijakan yang berlaku pada saat Erdoğan menjabat sebagai Perdana Menteri maupun Presiden.

2. 2. 2. Hubungan Turki – Israel pasca-insiden Mavi Marmara (2010-2014)

Antagonisme Turki terhadap Israel telah dimulai semenjak Erdoğan bersama Partai AKP memegang tampuk pemerintahan di Turki. Pada masa ini,

Erdoğan masih menjabat sebagai Perdana Menteri Turki, dengan dua Presiden di atasnya, yaitu Ahmet Necdet Sezer dari 2003 sampai 2007 dan Abdullah Gul pada 2007 sampai 2014. Periode tersebut berada dalam kurun waktu 2002 sampai 2006 saat Partai AKP dan Perdana Menteri Erdoğan begitu mengutamakan peningkatan hubungan diplomatik dengan Hamas dibandingkan Israel (Karmon & Barak, 2018, pp. 75–76). Seperti misalnya, penerimaan delegasi Hamas yang dipimpin oleh Khaled Meshaal tahun 2006 dan sikap penuh konfrontasi dari Perdana Menteri Erdoğan terhadap Presiden Israel Shimon Peres dalam World Economic Forum di Davos tahun 2009 dan 2013 (Baz, 2017, pp. 566–567). Isu Palestina adalah kunci bagi Turki, sebagai strategi dalam menjadi negara aktif dalam geopolitik regional. Dapat disebutkan bahwa isu Palestina merupakan bagian dari langkah yang diambil oleh Turki dalam rancangan kebijakan luar negeri yang bertajuk “*Strategic Depth*”. Perdana Menteri Erdoğan dan Partai AKP tidak melihat Israel sebagai sebuah celah untuk mengambil porsi dalam geopolitik regional. Sebaliknya, Perdana Menteri Erdoğan melihat identitas Islam dan dukungan terhadap Palestina sebagai sebuah langkah yang menjanjikan dalam menjajaki kancah geopolitik Timur Tengah. Palestina menjadi determinan penting yang merubah sebagian besar sikap elit politik Turki terhadap Israel.

Semua deteriorasi hubungan diplomatik antara Turki dan Israel memuncak kuat pada insiden Mavi Marmara tahun 2010 (Kanat, 2012, p. 246). Insiden Mavi Marmara terjadi ketika Israel memberlakukan blokade di Laut Mediterania, sebagai langkah untuk membatasi kekuatan militer Hamas yang semakin menguat semenjak tahun 2006. Insiden ini adalah kejadian yang menggemparkan, dimana pencegahan

atas kapal bantuan kemanusiaan (salah satunya adalah kapal MV Mavi Marmara) oleh militer Israel yang menimbulkan sembilan korban jiwa. Delapan diantaranya berkebangsaan Turki (Aljazeera, 2016). Israel memiliki alasan logis, namun tidak diplomatis dalam pencegahan insiden ini. Insiden Mavi Marmara merupakan fenomena penegakkan keamanan nasional bagi Israel, namun merupakan tindakan terorisme bagi Turki.

Insiden ini membuat Turki begitu marah terhadap Israel. Ahmet Davutoglu sebagai Menteri Luar Negeri Turki melihat ini sebagai tindakan terorisme dan menyamakan aksi Israel dengan terorisme 9/11 yang terjadi di Amerika Serikat (Volfová, 2014, pp. 87–88). Turki menuntut Israel untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban insiden tersebut, yang mana belum dilakukan Israel hingga empat tahun lamanya. Ada tuntutan yang tidak dapat dipenuhi oleh Israel, yakni pembukaan blokade ke jalur Gaza. Israel melihat permintaan tersebut sebagai suatu negosiasi yang riskan. Israel tidak dapat mengangkat blokade ke jalur Gaza dengan alasan keamanan nasional, sementara Turki menjadikannya sebagai syarat penting dalam normalisasi hubungan.

Pada waktu tersebut, Turki memberikan sifat antagonis yang kuat terhadap Israel dan memperburuk kemerosotan hubungan diplomatik antara kedua negara ini. Latihan militer gabungan telah dibatalkan dan Turki menarik semua diplomatnya dari Israel. Turki benar-benar menutup telinga terhadap semua usaha yang dilakukan oleh Israel. Langkah Turki dalam menarik mundur para diplomatnya dan mengkonfrontasi Israel dalam forum-forum internasional tetap

dilakukan, bahkan ketika Amerika Serikat berusaha untuk menjadi penengah dari permasalahan diplomatik kedua negara ini (Cohen, 2013, pp. 27–28).

Manuver politik yang dilakukan oleh Partai AKP dan Perdana Menteri Erdoğan pada saat itu cukup riskan. Turki begitu memihak kepada kepentingan Palestina dan identitas Islamnya. Perdana Menteri Erdoğan menyaratkan secara khusus kepada Perdana Menteri Netanyahu sebagai langkah untuk normalisasi hubungan dengan Israel, yang membutuhkan waktu dan serangkaian negosiasi yang panjang untuk dapat mewujudkan normalisasi hubungan. Insiden ini adalah salah satu fenomena Ambivalensi dari kebijakan luar negeri Turki, sekaligus instrumen kebijakan luar negeri Turki dalam menguatkan pengaruhnya di atas Israel dan Turki berhasil meskipun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan respons maaf dan repatriasi dari Israel. Usaha normalisasi hubungan antara Turki dan Israel memiliki perkembangan pertama pada 24 Maret 2014 saat Perdana Menteri Netanyahu menyampaikan permintaan maaf kepada Perdana Menteri Erdoğan atas meninggalnya 8 warga negaranya dalam insiden tersebut (Samuel et al., 2020, p. 14; Volfová, 2014, p. 88).

Insiden Mavi Marmara membuat hampir semua lini kerjasama antara Turki dan Israel menurun dan menjadi begitu dingin. Meskipun begitu, ini adalah titik Ambivalensi kebijakan Turki yang dapat terlihat jelas. Turki masih mengecam semua tindak-tanduk Israel terhadap Palestina. Di dalam forum ekonomi dunia yang diselenggarakan di Davos, Perdana Menteri Erdoğan masih melakukan pengecaman terhadap tindakan Israel di Laut Mediterania. Di sisi lain, Turki masih

menjalin kerjasama informasi di bidang keamanan dengan mempertimbangkan beberapa perhitungan penting (*Idem*).

Situasi tidak mendukung antagonisme Turki dan Israel untuk terus berjalan. Turki dan Israel dihadapkan dengan isu keamanan yang cukup penting. Hal ini turut mendorong Israel untuk mulai menurunkan pandangan kokohnya dan mulai melangkah untuk memperbaiki hubungan dengan Turki. Normalisasi hubungan antara Turki dengan Israel turut dibantu oleh Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Perdana Menteri Erdoğan, di tengah pengecamannya terhadap tindakan Israel dalam insiden Mavi Marmara, tetap menyatakan bahwa Israel merupakan mitra yang penting bagi Turki (Hurriyet Daily News, 2016).

Perdana Menteri Erdoğan dengan para koleganya menginginkan Turki mendapat simpati dan perhatian dari negara-negara tetangganya. Akan tetapi, efek gerakan Arab Spring membawa ketidakstabilan terhadap negara-negara tetangga dari Turki. Pragmatisme dalam kebijakan luar negeri Turki menjadi faktor yang akhirnya kembali menyatukan kerenggangan hubungan antara Turki dengan Israel, terutama dari sisi keamanan. Adanya potensi ancaman dari ketidakstabilan politik yang berasal dari Suriah dan Iran menjadi dorongan atas pragmatisme kebijakan luar negeri Turki. Hasil dari faktor ini adalah kerjasama intelijen, keamanan dan ekonomi yang tetap terjalin antara Turki dengan Israel (Alsaftawi, 2016, pp. 9–10)..

2. 2. 3. Hubungan Turki – Israel pada masa Presidensi Erdoğan (2014 – 2018)

Pada tahun 2014, Erdoğan dipilih secara demokratis sebagai Presiden dari Republik Turki. Pada periode ini, dominasi Partai AKP dalam politik domestik

Turki benar-benar kuat. 2014 menjadi tahun penanda dimulainya era kepemimpinan Presiden Erdoğan hingga 2023 ini. Secara domestik, masa ini menjadi masa awal Partai AKP mendapatkan reputasi sebagai partai populis dengan pemerintahan yang cukup otoriter. Bahkan aliansi politik oleh elit-elit politik Gülenis yang berasal dari kalangan militer mulai runtuh tatkala kalangan Gülenis menyerang Partai AKP dengan tuduhan-tuduhan korupsi dan bahkan melancarkan kudeta yang gagal di tahun 2016 (The Wall Street Journal, 2016; Taspinar, 2018). Ketika Erdoğan menjabat sebagai Presiden, hubungan diplomatik Turki dengan negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa turut mengalami penurunan (Benvenuti, 2017, p. 16). Terdapat opini publik anti-Barat yang kuat ketika Erdoğan menjabat sebagai Presiden pada masa ini.

Presidensi Erdoğan tidak membawa banyak perubahan dalam kebijakan luar negeri Turki. Haluan kebijakan luar negeri Turki masih mengikuti konsep *Strategic Depth* yang dicetuskan oleh Menteri Luar Negeri terdahulunya, yaitu Ahmet Davutoglu. Hanya saja, Turki menghadapi masalah baru dari sisi keamanan nasionalnya. Gerakan politik *Arab Spring* yang terjadi di Mesir, Libya dan Tunisia membawa efek luas bagi negara-negara Arab di sekitarnya. Turki memang menjadi model dalam politik Arab pada saat itu. Turki memiliki ekonomi dan pembangunan yang cukup maju dibandingkan negara-negara Arab lainnya yang agak tertinggal karena rezim orde lama. Negara-negara seperti Mesir dan Libya melihat bahwa demokrasi dengan Islam dapat membawa kemajuan di Turki, dan pandangan *Neo-Ottoman* adalah model yang relevan dalam menjalankan suatu pemerintahan. Namun, revolusi tersebut tidak senantiasa membawa dampak baik. Instrumen

demokrasi Turki yang menjadi model revolusi bukanlah sebuah obat mujarab bagi permasalahan negara-negara Arab-Afrika. Kemajuan ekonomi, demokrasi dan politik Islam di Turki bukan hasil dari evolusi yang bersifat *sui generis* (Tocci et al., 2011, pp. 20–22). Revolusi *Arab Spring* justru memberikan ketidakstabilan politik dan insurjensi yang membahayakan stabilitas regional di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara.

Fenomena *Arab Spring* membawa dampak kepada hubungan bilateral Turki dengan Israel. Lebih tepatnya, *Arab Spring* memberikan Turki dan Israel sebuah kesempatan untuk mengkaji sifat antagonistik secara strategis. Turki dan Israel menghadapi permasalahan yang serupa tapi tidak sama. Turki mengubah banyak instrumen kebijakan luar negerinya dengan negara-negara Arab, terutama dengan Suriah. Turki mengutamakan kepentingan nasionalnya, dan Turki melihat ketidakstabilan politik dalam geopolitik Timur Tengah memberikan dampak yang tidak menguntungkan (Murinson, 2012, pp. 21–22). Turki membutuhkan keamanan strategis dan kestabilan kerjasama ekonomi, hal yang sulit dicapai pada masa *Arab Spring*. Israel memiliki kepentingan yang sama, dan berusaha mencegah isolasi lebih jauh dari negara-negara tetangganya. Sayangnya, perubahan ini tidak berdampak penuh pada hubungan diplomatik. Turki dan Israel masih memiliki hubungan kerjasama militer dan ekonomi, namun secara politik Turki dan Israel masih memiliki ketegangan yang belum mereda (Goren, 2012, pp. 127–131). Turki dan Israel memang melaksanakan serangkaian negosiasi dan diplomasi di belakang layar. Tetapi Turki dan Israel tidak menurunkan ego masing-masing.

Meskipun terdapat pergolakan politik domestik pada periode awal Erdoğan menjabat sebagai Presiden Turki, tetapi hubungannya dengan Israel dinilai terus berjalan. Hal ini bukan berarti secara politik, Turki langsung memaafkan dan meredakan tensi yang telah terjadi pasca insiden Mavi Marmara. Presiden Erdoğan melalui diplomasi personalnya terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berusaha untuk menjaga hubungan antara Turki dan Israel agar tidak mengalami kemerosotan lebih lanjut (Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs, 2013). Keberlangsungan hubungan ini didasarkan atas kesamaan kepentingan dalam bidang ekonomi, terutama pariwisata dan jalur perdagangan. Turki dan Israel menjalankan rekonsiliasi yang cukup baik pada tahun 2016, saat Turki menggugurkan persyaratan pembukaan blokade jalur Gaza (Fishman, n.d., p. 3).

Turki dan Israel bukanlah pemain baru dalam ranah geopolitik regional. Fenomena *Arab Spring* dan posisi kepresidenan Erdoğan membawa perubahan dalam kebijakan luar negeri Turki. Turki memiliki visi dalam kebijakan luar negerinya. Namun, Turki juga memiliki pragmatisme dalam meraih kepentingan nasional yang dituju. Turki memahami situasi geopolitik Timur Tengah. Dorongan dan batasan dari aspek internal (domestik) maupun eksternal (geopolitik) membentuk sifat Turki terhadap Israel. Dalam idealisme pandangan *Neo-Ottoman*, Turki melihat peluang yang baik dalam menjadi pemain kunci. Namun, kebijakan luar negeri juga memiliki batasan-batasan tertentu. Ada harga yang harus dibayar dan ada sisi yang harus dipilih. Turki menengahi dan menyeimbangkan gagasan *Idealpolitik*-nya dalam corak *Neo-Ottoman* berkonsep *Strategic Depth* dengan

Realpolitik-nya. Sebagian peneliti menyebut upaya penyeimbangan ini sebagai *Moral Realism* (Keyman, 2017, pp. 62–64).

2. 3. Nilai Neo-Ottoman dalam Politik Turki

Tidak semua negara memiliki keunikan dalam pola politik domestiknya. Meskipun prosesnya sama, namun beberapa negara memiliki ciri khas dalam proses perumusan kebijakan luar negerinya. Turki memiliki ciri khas tersebut. Keunikan dan ciri khas tersebut tercermin dalam cara pandang, interaksi dan cara kerja dari Partai AKP yang hingga kini masih memegang kekuatan politik di Turki.

Pada masa kepemimpinan Presiden Erdoğan maupun saat Erdoğan dan Ahmet Davutoglu menjabat sebagai Perdana Menteri, Partai AKP (*Adalet ve Kalkınma Partisi*) memegang pengaruh yang kuat dalam politik domestik sebagai partai besar yang berkuasa dalam pemerintahan. Partai ini memiliki corak yang sama seperti pendahulunya, *Refah Partisi*, yang merupakan partai Islam konservatif. Meskipun, Partai AKP selalu menjunjung nilai demokrasi dalam klaim dari elit-elit politiknya. Pada awal kemunculannya, Partai yang didirikan oleh Erdoğan ini memiliki keselarasan yang unik. Meskipun sering disebut sebagai suksesor *Refah Partisi* dan penganut pandangan *Neo-Ottoman* dalam kepentingan politiknya, Partai AKP memiliki perhatian khusus pada aliran *laicism*⁶, yang membuatnya tidak selalu dipandang sebagai Partai Islam yang konservatif (Karakas, 2007).

⁶ Sebuah pandangan yang menekankan netralitas pihak pemerintah terhadap pengaruh dari agama. Pandangan ini sedikit berbeda dengan *laicism* dari perspektif Kemalis yang lebih menekankan pembatasan pengaruh dibandingkan netralitas.

Konsepsi kebijakan luar negeri Turki didasarkan pada pemikiran bahwa Turki, harus dapat menjadi pemain kunci bagi situasi politik yang didominasi oleh negara-negara Islam (Aras, 2009, pp. 130–132). Pemikiran ini berakar dari aspek geografis dan historis Turki. Lekat kaitannya dengan identitas Islam pada masa kesultanan Utsmaniyah (Yanik, 2016, p. 474). Konsep ini tidak semata-mata datang dari usulan lembaga legislatif yang berperan dalam perumusan dan pembuatan rekomendasi kebijakan saja, namun juga melalui banyak kalkulasi dan preferensi lembaga eksekutif sebelum akhirnya menjadi suatu haluan kebijakan luar negeri yang utuh.

Dalam corak Kemalis terdahulu, dapat diketahui bahwa aspek internal memiliki peran yang berpengaruh dalam hubungan Turki dan Israel. Hal yang sama terjadi dalam corak *Neo-Ottoman* dari Partai AKP. Partai ini tumbuh dalam dominasi politik Turki sejak awal tahun 2000. Dominasi ini muncul dari harapan masyarakat dan performa partai dalam mereformasi berbagai sektor dalam kehidupan masyarakat Turki. Misal, adanya negosiasi kerjasama yang lebih jauh yang ditujukan untuk integrasi dengan Uni Eropa. Lalu reformasi yang cukup kuat dan mendasar di bidang pendidikan, ekonomi dan teknologi. Hal ini membawa kemajuan terhadap masalah-masalah domestik maupun regional yang dihadapi oleh Turki pada tahun 2000an efektif membawa partai AKP kepada tampuk kekuasaan yang utama. Di sisi lain, Partai AKP tidak menonjolkan corak Islam konservatifnya pada saat pemilihan umum pertama. Melainkan mengirimkan pesan-pesan yang moderat. AKP berusaha untuk memposisikan dirinya sebagai pihak yang mampu menjawab tantangan dari perspektif masyarakat. Hal ini adalah sebuah langkah baru

yang lebih dekat dengan masyarakat dibandingkan penyikapan masalah yang ditentukan oleh partai yang dilatarbelakangi oleh orang-orang militer (Cinar, 2006, p. 473).

Partai AKP mendefinisikan dirinya dengan pandangan yang berbeda dari Partai Refah. Hal ini didasarkan atas perbedaan antara partai politik dengan partai Islam. Partai Islam melihat globalisasi dan materialisasi sebagai ancaman terhadap nilai-nilai domestik tertentu (dalam hal ini agama). Bahkan menyamakan globalisasi dengan imperialisme Barat sehingga pandangan ini sangat melawan sekularisme dari pandangan Kemalis. Maka dari itu, Partai AKP memosisikan entitas partainya sebagai partai pluralis dan optimis akan perubahan situasi politik, non-ideologis namun tetap mengelola kepentingan berbasis agama.

Namun, pergerakan politik Partai AKP dan Presiden Erdoğan tidak selalu berjalan dengan mulus. Partai AKP dan Presiden Erdoğan mendapatkan kritik tentang janji demokrasi yang diusung pada masa-masa awal kenaikannya ke pemerintahan. Hal ini juga dilandasi oleh kepentingan Partai AKP dalam upayanya menjadikan Turki sebagai anggota Uni Eropa, fakta di lapangan menunjukkan bahwa demokrasi dan sifat-sifat negara Barat memiliki arti lain yang mungkin berseberangan dengan niat Turki dalam menjembatani perspektif Barat dengan Timur (Aydindag & Isiksal, 2021, pp. 505–506). Meskipun Erdoğan memiliki sikap yang vokal dalam pembagian kekuatan dan reformasi untuk menyelesaikan masalah-masalah domestik yang dihadapi Turki, masalah lain timbul. Masyarakat Turki melihat potensi kemerosotan demokrasi dan merasakan peningkatan sifat otoritarian dalam masa kepemimpinan Presiden Erdoğan dan Partai AKP. Mulai

tahun 2007, Partai AKP dan kepemimpinan Presiden Erdoğan tidak mencerminkan politik moderat yang dahulu diusung. Janji moderat berubah menjadi tindakan konservatif yang justru terlihat mirip dengan partai pendahulunya yang bercorak Islam (Ataseven, 2022, p. 38; Christofis, 2018, pp. 16–17). Hal ini juga merambah kepada kebijakan luar negeri Turki, tidak terkecuali terhadap Israel.

Masa awal dari kekuasaan Partai AKP dan perubahannya atas hubungan diplomatik dengan Israel dilandasi dengan perubahan dari faktor domestik Turki. Naiknya Partai AKP ke dalam kekuasaan, menguatnya ancaman terorisme domestik dari pergerakan etnis Kurdi praktis mengubah haluan dalam kebijakan luar negeri Turki. Partai AKP mencanangkan kebijakan luar negeri yang tidak memusuhi negara-negara tetangga, meskipun tidak dengan Israel (Taspinar, 2008, pp. 13–14). Reformasi besar-besaran dan pandangan untuk memproyeksikan kedigdayaan masa Kesultanan Utsmaniyah akhirnya mendorong Turki untuk lebih jauh menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Arab. Turki meletakkan perhatiannya terhadap Israel pada prioritas kesekian. Pembagian dan reformasi kekuatan politik membatasi peran militer yang umumnya bersifat sekuler dalam kebijakan luar negeri Turki (Hamid, 2004, p. 117). Secara efektif memotong probabilitas kerjasama antara Turki dan Israel dengan lebih jauh lagi.

Partai AKP mampu meningkatkan kepercayaan dan nasionalisme bagi sebagian masyarakat Turki melalui pandangan *Neo-Ottoman*-nya. *Neo-Ottoman* adalah pandangan tentang *soft-power* yang dimiliki Turki. Pandangan yang tidak mendorong sifat ekspansionis bagi suatu negara, namun tetap mendorong Turki untuk menjadi pemain aktif dalam geopolitik regionalnya di Timur Tengah Partai

AKP mampu menggugah identitas Islam Sunni yang berada di masyarakat Turki (Hazir, 2022, pp. 165–166). Tentu penulis tidak akan membahas identitas Islam yang digugah oleh pandangan *Neo-Ottoman* ini dari kaca mata konstruktivisme karena sudah berada di luar kerangka teori. Tetapi faktor sejarah dan identitas inilah, yang melekat dalam masyarakat dan elit politik Turki, yang ikut berperan dalam pembentukan kebijakan luar negeri dari Ankara. Landasan *Neo-Ottoman* inilah yang mendorong corak kebijakan *Strategic Depth*. Keselarasan Turki dengan negara-negara Arab tidak selalu dilihat sebagai upaya kesengajaan. Turki di bawah Partai AKP memiliki pandangan pragmatis. Dinamika politik domestik dan pandangan dari elit-elit partai terhadap pragmatisme geopolitik mendorong Turki untuk memiliki kebijakan luar negeri yang lebih strategis dan berdikari. Pandangan Partai AKP dalam transformasi kebijakan luar negeri tidak selalu mulus (Kennedy & Dickenson, 2013, pp. 172–173). Akan selalu ada pihak yang menjadi pembawa kekecewaan, dan dalam hal ini adalah Israel.

Pandangan *Neo-Ottoman* dan corak Islam Konservatif memiliki dampak dalam adanya kesan anti-westernisasi dalam opini dan kebijakan-kebijakan politik Turki. Protes dan pengutukan atas tindakan-tindakan Israel di Palestina mencapai puncaknya pada masa kepemimpinan Partai AKP dan Presiden Erdoğan, meskipun perhatian atas konflik Israel-Palestina sudah dimulai pada masa Partai *Refah* dan Perdana Menteri Erbakan. Publik tergugah akan pandangan *Neo-Ottoman*, dan mulai menunjukkan perhatian kepada pergerakan politik Islam. Tidak ada kesimpulan bahwa pandangan *Neo-Ottoman* membuat aktor domestik Turki menjadi dominan terhadap pandangan Islam. Hanya saja, terdapat peningkatan

kepekaan dan kecondongan terhadap aktor yang berlandaskan ideologi Islami (Kennedy & Dickenson, 2013, p. 183).

Israel sebenarnya bukan hanya satu-satunya pihak diplomatik yang terdampak dari pandangan *Neo-Ottoman* yang lekat kaitannya dengan pandangan Islam dan pragmatisme. Penerjemahan tekanan sistemik terhadap pandangan *Neo-Ottoman* ini membuat Turki tidak begitu berminat memperdalam kerjasama dengan negara-negara Barat jika tidak melakukan hal-hal yang sama dengan negara-negara Arab. Pandangan konservatif dari Partai AKP meningkatkan ketidakpercayaan kepada Amerika Serikat serta negara-negara Eropa, oleh karena kepentingan nasional yang tidak selaras (Ataseven, 2022, pp. 41–42)..

Keberadaan faktor domestik memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. Studi kasus Turki menjadi bukti bahwa faktor domestik dapat memberikan implikasi yang cukup signifikan dalam kebijakan luar negeri, terutama secara spesifik dengan negara mitra yang secara sosio-kultural berlawanan seperti Israel. Sebab, masing-masing unit faktor domestik memiliki kapabilitas kekuatannya masing-masing. Mereka dapat memberikan reaksi berbeda terhadap suatu tekanan sistemik (eksternal), sehingga patut dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan luar negeri. Faktor domestik adalah kekuatan nasional, dan pengaruh mereka dalam kebijakan luar negeri memberikan contoh beragamnya kapabilitas material yang dimiliki negara dalam mencapai kepentingannya (Lobell et al., 2009, pp. 33–38). Pada sub-bab ini, penulis dapat melihat bahwa faktor domestik memberikan reaksi terhadap tekanan sistemik. Adanya perubahan dalam proporsi kekuasaan dan penekanan akan pandangan serta identitas tertentu

membawa gaya atau corak baru dalam hubungan bilateral antara Turki dengan Israel. Corak konservatif dan pro-Muslim di bawah kepemimpinan Partai AKP memiliki interkoneksi dengan unsur-unsur unit pengambilan kebijakan yang lainnya. Tidak selalu berbicara dengan partai, namun juga dengan publik dan militer yang turut memberikan kesan Ambivalensi terhadap kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel.

Sebagai kesimpulan, penulis akan merekapitulasi beberapa poin penting dalam gambaran umum kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel yang sejauh ini sudah berjalan. Pertama, bahwa setiap rezim memiliki ciri khasnya dalam merancang kebijakan luar negeri terhadap Israel. Kedua, bahwa corak kebijakan luar negeri yang dianut sebelum masa Partai AKP mencerminkan pandangan Kemalis yang pro-Barat. Ketiga, Partai AKP memiliki cara berpikir tertentu yang disebut sebagai *Neo-Ottoman* dan hal tersebut tercermin dalam kebijakan luar negerinya terhadap Israel. Penulis menggambarkan hal tersebut berdasarkan fenomena politik domestik dari Turki pada masa kepemimpinan Partai AKP.

Poin-poin tersebut memberikan kesimpulan kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel selama ini bersifat pragmatis. Turki mengalami perubahan kepemimpinan yang diikuti oleh perubahan cara pandang terhadap Israel sebagai sekutu di kawasan Timur Tengah. Perubahan cara pandang dalam kebijakan luar negeri semakin kuat saat Partai AKP memegang kekuasaan tertinggi di Turki, dengan Erdoğan sebagai pemain kuncinya. Adapun sifat Ambivalensi kebijakan luar negeri Turki terhadap Israel lebih lanjut akan dijelaskan dalam Bab 3.